

**Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Strategi
Penanggulangan *Stunting* Pada Balita Di Posyandu Bunga Rose
Kelurahan Margorejo**

***Evaluation Of The Free Nutritious Meal Program As A Strategy To
Counter Stunting In Toddlers At Bunga Rose Posyandu, Margorejo
Sub-District***

Yuyun Fitriani^{1*}, Joko Mulyono², Sri Sundari³, Amad Julnaim⁴, Helna Yurdana⁵)
^{1,2,3,4,5} Prodi Administrasi Publik, Universitas Dharma Wacana, Indonesia

*Email correspondence : yuyunfitriani01.yf@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai strategi penanggulangan *stunting* pada balita di Posyandu Bunga Rose, Kelurahan Margorejo. Permasalahan penelitian berangkat dari pentingnya pemenuhan gizi balita dan masih ditemukannya kasus *stunting* meskipun program MBG telah dilaksanakan. Penelitian bertujuan menganalisis pelaksanaan dan efektivitas MBG berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan publik William N. Dunn, meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, yaitu kader posyandu, pegawai SPPG, Pegawai kelurahan, ibu balita, dan bidan posyandu. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG di Posyandu Bunga Rose telah menjangkau seluruh 49 balita sasaran dan diberikan setiap hari. Dari keseluruhan penerima, 48 balita tidak mengalami *stunting*, sedangkan 1 balita masih mengalami *stunting*. Berdasarkan kriteria evaluasi Dunn, program menunjukkan capaian positif pada efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, terutama dalam menyediakan asupan makanan bergizi secara rutin dan menjangkau seluruh sasaran. Namun, MBG belum dapat menjadi solusi tunggal penanggulangan *stunting*. Kesimpulannya, MBG cukup efektif sebagai intervensi pemenuhan gizi, tetapi perlu diintegrasikan dengan pemantauan pertumbuhan, edukasi gizi dan pola asuh, pemeriksaan kesehatan, serta intervensi khusus bagi balita berisiko.

Kata kunci : evaluasi kebijakan; makan bergizi gratis; *stunting*; posyandu; balita.

ABSTRACT

This study evaluates the effectiveness of the Free Nutritious Meal (MBG) program as a strategy to combat stunting among toddlers at the Bunga Rose Integrated Health Post (Posyandu) in Margorejo Urban Village. The research addresses the critical need for proper toddler nutrition and the persistence of stunting cases despite the implementation of the MBG program. The study aims to analyze the program's implementation and effectiveness based on William N. Dunn's public policy evaluation criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. A qualitative approach with a descriptive method was employed. Data were collected through

interviews, observation, and document review. Informants were selected purposively, comprising Posyandu volunteers, SPPG staff, urban village officials, mothers of toddlers, and Posyandu midwives. Data analysis followed the Miles and Huberman model, involving data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the MBG program at Bunga Rose Posyandu successfully reached all 49 targeted toddlers and provided daily meals. Among the recipients, 48 toddlers were free from stunting, while one remained stunted. Based on Dunn's evaluation criteria, the program demonstrated positive outcomes regarding effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness—particularly in providing regular nutritious meals and reaching the entire target group. However, the MBG program alone cannot serve as the sole solution for addressing stunting. In conclusion, while the MBG program is effective as a nutritional intervention, it requires integration with growth monitoring, education on nutrition and parenting, health check-ups, and targeted interventions for at-risk toddlers.

Keywords : policy evaluation; free nutritious meals; stunting; posyandu; toddlers.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas (Mahadiansar et al., 2020). Salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan suatu negara adalah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki (N. A. Azizah, 2022). Sumber daya manusia yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan, tetapi juga oleh kondisi kesehatan dan status gizi masyarakat sejak usia dini. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya pada anak-anak, menjadi salah satu fokus utama dalam agenda pembangunan nasional.

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, permasalahan gizi masih menjadi tantangan yang serius bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia (Hakam, Irhash Abdul ; Krisna Fatahillah, Rini Nur Faniati, Nihayah Nurul Izzah, 2023). Salah satu masalah gizi yang mendapat perhatian besar dari pemerintah dan berbagai organisasi internasional adalah *stunting* (Noor et al., 2023). *Stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan

oleh kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang lama, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun (Hizriyani, 2021). Kondisi ini menyebabkan tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan standar usianya serta dapat berdampak pada perkembangan fisik dan kognitif anak di masa depan.

Menurut definisi yang dikemukakan oleh World Health Organization, *stunting* merupakan kondisi di mana tinggi badan anak berada di bawah minus dua standar deviasi dari standar pertumbuhan anak berdasarkan usia. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan permasalahan gizi yang dialami anak, tetapi juga menggambarkan adanya ketimpangan sosial, ekonomi, serta kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai (Fatoni et al., 2020). *Stunting* juga dapat berdampak pada menurunnya kemampuan belajar anak, meningkatnya risiko penyakit kronis di masa dewasa, serta rendahnya produktivitas tenaga kerja di masa depan.

Permasalahan *stunting* menjadi isu strategis dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menjadikan penurunan angka *stunting*

sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mencapai target pembangunan global yang tercantum dalam agenda *United Nations* melalui program *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan kedua yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan (Handrian & Andry, 2020) (Siringoringo, 2022).

Upaya penanggulangan *stunting* di Indonesia dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program yang bersifat lintas sektor. Pemerintah melibatkan berbagai kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting*. Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam program ini adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang bertugas mengoordinasikan berbagai program intervensi yang berkaitan dengan keluarga, kesehatan reproduksi, serta peningkatan kualitas gizi masyarakat. Program intervensi gizi telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk menurunkan angka *stunting*, baik melalui intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik mencakup kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, seperti pemberian makanan tambahan, suplementasi gizi, serta pemantauan pertumbuhan anak (Lasmadasari, Novi; Nengke Puspitasari, Iin Nilawati, 2023). Sementara itu, intervensi gizi sensitif mencakup program-program yang mendukung perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti peningkatan akses air bersih, sanitasi, pendidikan, serta ketahanan pangan keluarga.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia juga memperkenalkan berbagai inovasi kebijakan untuk memperkuat upaya pemenuhan gizi masyarakat. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Qomarrullah, 2025). Dasar Hukum pelaksanaan program MBG adalah Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini dirancang sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan. Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian anak sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang lebih luas. Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh asupan gizi yang cukup dan berkualitas. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi anak sejak dini, diharapkan dapat mencegah terjadinya berbagai permasalahan kesehatan, termasuk *stunting*.

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dilakukan melalui berbagai pendekatan dan melibatkan berbagai institusi di tingkat pusat maupun daerah (Agustini & Mulyani, 2025). Salah satu institusi yang memiliki peran penting dalam mendukung program ini adalah posyandu. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis

masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat desa atau kelurahan. Posyandu menjadi sarana yang sangat strategis dalam upaya pemantauan pertumbuhan balita serta pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi anak (Lestari et al., 2023). Keberadaan posyandu sebagai layanan kesehatan berbasis masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting*. Melalui kegiatan posyandu, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan kesehatan, seperti penimbangan balita, imunisasi, pemberian vitamin, serta penyuluhan kesehatan dan gizi. Selain itu, posyandu juga berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan gizi keluarga (Dian, 2023).

Salah satu posyandu yang aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah Posyandu Bunga Rose yang berada di Kelurahan Margorejo. Posyandu ini secara rutin melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, termasuk pemantauan pertumbuhan balita serta kegiatan penyuluhan mengenai kesehatan dan gizi. Dengan adanya Program Makan Bergizi Gratis, diharapkan posyandu dapat berperan lebih optimal dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan gizi balita serta mencegah terjadinya *stunting* di wilayah tersebut.

Namun, keberhasilan suatu program kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Dalam praktiknya, implementasi program seringkali

menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar pelaksana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi anak (Lendra, 2025). Melalui evaluasi program, pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan di masa yang akan datang.

Dalam kajian administrasi publik, evaluasi program merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, serta dampak dari suatu program kebijakan terhadap masyarakat. Menurut pandangan William N. Dunn, evaluasi kebijakan merupakan proses analisis yang bertujuan untuk menilai nilai atau manfaat dari suatu kebijakan publik. Evaluasi ini tidak hanya melihat hasil akhir dari suatu kebijakan, tetapi juga memperhatikan proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik yang berfungsi untuk menilai sejauh mana suatu program atau kebijakan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif administrasi publik, evaluasi digunakan sebagai alat untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak dari suatu kebijakan atau program pemerintah.

Menurut William N. Dunn, evaluasi kebijakan adalah proses penilaian secara sistematis terhadap nilai atau manfaat dari suatu kebijakan publik berdasarkan

kriteria tertentu seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dunn menjelaskan bahwa evaluasi tidak hanya menilai hasil kebijakan, tetapi juga memberikan informasi bagi pengambilan keputusan dalam proses kebijakan selanjutnya. Dengan demikian, evaluasi menjadi instrumen penting untuk mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan telah memberikan manfaat bagi masyarakat atau justru perlu diperbaiki (Nadila, 2023). Sementara itu, James E. Anderson mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu kebijakan atau program telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target yang telah direncanakan sebelumnya. Anderson menekankan bahwa evaluasi merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik karena dapat memberikan umpan balik bagi pembuat kebijakan (Rantung, 2024). Pendapat lain dikemukakan oleh Daniel L. Stufflebeam, yang menyatakan bahwa evaluasi adalah proses memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Menurutnya, evaluasi tidak hanya menilai keberhasilan suatu program, tetapi juga memberikan dasar informasi bagi pengambilan keputusan di masa mendatang. Oleh karena itu, evaluasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik (Nukhatillah et al., 2024). Selanjutnya, Suchman menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk menentukan sejauh mana suatu program telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan melalui

pengumpulan dan analisis data secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan atau kegagalan suatu program. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi dalam administrasi publik merupakan suatu proses sistematis untuk menilai pelaksanaan dan hasil suatu kebijakan atau program pemerintah dengan tujuan mengetahui tingkat keberhasilan, efektivitas, serta dampaknya bagi masyarakat.

Tinjauan Program

Dalam kajian administrasi publik, program merupakan instrumen penting yang digunakan pemerintah atau organisasi publik untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Program biasanya berisi serangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), program diartikan sebagai rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan dalam berbagai bidang seperti pemerintahan, perekonomian, dan pembangunan. Program merupakan bentuk perencanaan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Lutfia Gunawan, Aisyah; Hasna Asyila Syifa, Lina Agustina, Puji Rahayu, 2025). George R. Terry mendefinisikan program sebagai rencana komprehensif yang mencakup penggunaan berbagai sumber daya secara terpadu serta serangkaian tindakan yang memiliki jadwal waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam suatu program biasanya terdapat unsur tujuan, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan anggaran (Maghfiroh, 2025).

Selanjutnya Kunarjo menyatakan bahwa program merupakan sekumpulan kegiatan yang saling berkaitan dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Program tidak hanya berupa rencana umum, tetapi juga terdiri dari kegiatan yang saling mendukung dalam satu kesatuan sistem. Menurut Hasibuan, program adalah rencana yang konkret karena di dalamnya telah tercantum sasaran, kebijakan, prosedur pelaksanaan, waktu pelaksanaan, serta anggaran yang diperlukan (Chasanah, 2024). Dengan demikian, program merupakan bentuk operasional dari perencanaan yang lebih luas. Sementara itu Manullang mengemukakan bahwa program merupakan kombinasi dari kebijakan, prosedur, serta anggaran yang dirancang untuk menentukan serangkaian tindakan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Dalam perspektif kebijakan publik, Jones menyatakan bahwa program merupakan cara yang disahkan untuk mencapai tujuan kebijakan. Artinya, program merupakan bentuk implementasi konkret dari kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Berdasarkan berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa program merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis, terencana, dan terkoordinasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Tinjauan Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan balita. Program ini dirancang

untuk meningkatkan status gizi, mencegah kekurangan gizi, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal (Rahmah et al., 2025). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pemberian makanan bergizi kepada anak merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan menurunkan angka *stunting* serta malnutrisi. Program pemberian makanan bergizi biasanya mencakup penyediaan makanan yang mengandung protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang seimbang (Weyana et al., 2025). Dalam konteks kebijakan publik di Indonesia, program makan bergizi gratis juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Program ini diarahkan untuk membantu keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi agar anak-anak tetap memperoleh asupan gizi yang cukup.

Tinjauan Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu yang lama, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih rendah dari standar usianya berdasarkan standar pertumbuhan anak dari World Health Organization (WHO) (Rahmadhita, 2020). Menurut World Health Organization, *stunting* merupakan gangguan pertumbuhan yang terjadi karena asupan gizi yang tidak memadai, infeksi berulang, serta kurangnya stimulasi dan perawatan kesehatan pada anak. Anak dikategorikan *stunting* apabila nilai tinggi badan

menurut umur (TB/U) berada di bawah -2 standar deviasi dari standar pertumbuhan anak WHO (Hidayani et al., 2022)

Tinjauan Posyandu

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan bimbingan petugas kesehatan. Posyandu berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar secara mudah dan terjangkau (Kusuma et al., 2021). Sementara itu, menurut World Health Organization (WHO), pelayanan kesehatan berbasis komunitas seperti Posyandu merupakan strategi penting dalam meningkatkan akses layanan kesehatan dasar, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan balita (Nugroho et al., 2023). Dengan demikian, Posyandu dapat dipahami sebagai lembaga pelayanan kesehatan yang dikelola secara partisipatif oleh masyarakat dengan dukungan pemerintah guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Tujuan utama penyelenggaraan Posyandu adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. Secara lebih rinci, tujuan Posyandu meliputi:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
2. Meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya bayi dan balita.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak.
4. Mempercepat penurunan masalah gizi seperti *stunting*.
5. Mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam melakukan evaluasi kebijakan publik, yaitu (Subianto, 2020): Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan (*Adequacy*), Pemerataan (*Equity*), Responsivitas, Ketepatan (*Appropriateness*). Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana peneliti melakukan penelitian, dalam penelitian ini lokasi menjadi sumber informasi yang dapat mengungkap dan menggambarkan fenomena yang terjadi serta informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian (Safrudin et al., 2023). Penelitian ini dilaksanakan di Posyandu Bunga Rose Kelurahan Margorejo. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: (1) Posyandu Bunga Rose merupakan salah satu posyandu yang melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis bagi balita; (2) Posyandu ini memiliki jumlah balita yang cukup signifikan sehingga dapat memberikan data yang representatif terkait kondisi gizi dan *stunting*.

Informan penelitian merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kegiatan pelayanan kesehatan balita di Posyandu. Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan pertimbangan bahwa mereka mampu memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian,

khususnya terkait evaluasi program dalam upaya penanggulangan *stunting* pada balita. Penelitian dilaksanakan dengan melibatkan 9 informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman mereka terhadap pelaksanaan MBG. Informan terdiri atas 1 orang kader Posyandu Bunga Rose, 1 orang tenaga bidan Puskesmas Margorejo yang terlibat dalam pelayanan posyandu, 1 orang Pegawai SPPG Margodadi 3, 1 orang perwakilan pegawai Kelurahan Margoreji, dan 5 orang ibu atau orang tua balita penerima manfaat.

Pengumpulan data data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis miles and huberman. Miles and Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari kader posyandu, tenaga kesehatan, pemerintah kelurahan, pelaksana program, dan ibu/orang tua balita sebagai penerima manfaat. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengumpulan atau pengecekan data pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi. Selain triangulasi,

peneliti melakukan *member checking* dengan mengonfirmasi kembali informasi penting kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud yang disampaikan informan. Data yang memiliki perbedaan antarsumber tidak langsung dihilangkan, tetapi ditelusuri lebih lanjut melalui wawancara pendalaman dan pemeriksaan dokumen sehingga diperoleh informasi yang lebih kredibel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan kriteria evaluasi kebijakan publik menurut William N Dunn (Apriyadi, 2021):

1. Efektivitas

Mengevaluasi sejauh mana suatu kebijakan atau alternatif dapat mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan. Efektivitas berfokus pada keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai dampak yang diinginkan, baik dalam bentuk produk atau layanan yang dihasilkan maupun dalam nilai moneterinya (Apriyadi, 2021) (L. L. Azizah, 2022).

Hasil wawancara dengan kader posyandu terkait dengan efektivitas program MBG, informan menyatakan bahwa:

“Dari kegiatan posyandu, kami melihat sebagian besar anak dalam kondisi baik, sehingga dapat dikatakan program ini efektif. Dari 49 balita yang menjadi sasaran, berdasarkan data yang kami miliki hanya ada satu balita yang mengalami stunting. Sebanyak 48 balita lainnya tidak mengalami stunting. Tetapi pemenuhan gizi atau dan status Kesehatan anak kalau secara langsung mungkin tidak bisa

dikatakan hanya karena MBG, karena pertumbuhan anak juga dipengaruhi makanan di rumah, kesehatan, pola asuh, dan faktor lainnya. Tetapi MBG menurut kami membantu memenuhi kebutuhan makanan bergizi anak”

Hasil wawancara dengan informan lainnya yakni salah satu pegawai SPPG Margodadi 3 menjelaskan:

“Menurut saya cukup efektif karena makanan dapat diberikan kepada sasaran dan secara umum diterima oleh masyarakat. Program ini juga membantu orang tua dalam menyediakan makanan bergizi untuk anak. Sebagian besar anak menerima dan mengonsumsi makanan yang diberikan. Memang ada beberapa anak yang terkadang tidak menghabiskan makanan, biasanya karena selera atau kebiasaan makan masing-masing”.

Dari aspek efektivitas, pelaksanaan program MBG di Posyandu Bunga Rose dapat dinilai belum sepenuhnya efektif karena meskipun dari 49 balita yang terdata dalam posyandu bunga rose hanya ada 1 balita yang masih mengalami *stunting* hal tersebut tidak berkorelasi langsung dengan keefektifan program MBG. Karena efektivitas program tidak dapat hanya diukur dari rendahnya jumlah balita *stunting*. Keberadaan satu balita yang masih mengalami *stunting* menunjukkan bahwa MBG perlu didukung dengan intervensi lain, seperti pemantauan pertumbuhan secara berkala, edukasi gizi kepada orang tua, pemenuhan kebutuhan gizi di rumah, serta penanganan khusus bagi balita yang terindikasi mengalami masalah pertumbuhan. Oleh karena itu, MBG

dapat dikatakan telah efektif dari sisi cakupan dan pemberian asupan gizi, tetapi keberhasilan dalam menanggulangi *stunting* secara menyeluruh memerlukan keterpaduan dengan program kesehatan dan pemberdayaan keluarga lainnya.

2. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi, (Apriyadi, 2021) (Zakirin & Arifin, 2022).

Wawancara dengan kader posyandu bunga rose menunjukkan bahwa:

“pelaksanaannya sudah cukup efisien. Makanan yang disediakan oleh SPPG sudah dalam kondisi siap dibagikan kepada balita, sehingga kader tidak perlu mengolah atau memasak lagi. Kami lebih banyak membantu dalam proses penerimaan, pendataan, dan pembagian makanan kepada sasaran. Untuk kegiatan di posyandu, jumlah kader yang terlibat cukup membantu. Kami membagi tugas, ada yang mendata balita, menerima makanan, mengatur pembagian, dan membantu mengarahkan orang tua. Kalau semua kader hadir, pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat. Kendalanya biasanya lebih kepada kondisi di lapangan. Misalnya ada orang tua yang datang terlambat atau jumlah penerima yang hadir tidak sama dengan data awal. Tetapi biasanya bisa kami atasi dengan melakukan pendataan Kembali”

Pegawai SPPG Margodadi 3 yang menjadi salah satu informan mengungkapkan bahwa:

“Kami berusaha agar proses penyediaan makanan dilakukan secara efisien, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan, pengolahan, pengemasan sampai distribusi. Setiap tahapan sudah dibagi sesuai tugas masing-masing sehingga prosesnya dapat berjalan secara teratur. Kami memperhitungkan waktu yang diperlukan mulai dari proses memasak sampai pengiriman. Makanan harus selesai dikemas terlebih dahulu kemudian dikirim sesuai jadwal yang telah ditentukan. Koordinasi dengan pihak posyandu juga dilakukan supaya saat makanan tiba dapat langsung diterima dan dibagikan”.

Aspek efisiensi dapat dilihat dari pelaksanaan pemberian makanan bergizi kepada seluruh balita sebagai sasaran program. Terdapat 49 balita yang menjadi sasaran dan seluruh balita memperoleh MBG setiap hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program diarahkan secara langsung kepada kelompok sasaran, sehingga tidak terdapat balita yang terlewat dari pemberian makanan bergizi.

Dari sisi penggunaan sumber daya, efisiensi program dapat dilihat dari kemampuan pelaksana dalam menyediakan dan mendistribusikan makanan kepada 49 balita secara rutin setiap hari. Pelaksanaan program yang dilakukan melalui Posyandu juga mempermudah proses pendataan, pemantauan, dan pemberian makanan karena sasaran telah teridentifikasi dengan jelas. Dengan mekanisme

tersebut, program dapat dilaksanakan secara terorganisasi tanpa memerlukan proses distribusi yang terlalu kompleks.

3. Kecukupan (Adequacy)

Kecukupan dilihat dari seberapa jauh suatu tingkat efektifitas dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan (Apriyadi, 2021) (Apriani & Enos., 2020).

Hasil wawancara dengan kader posyandu bunga rose menunjukkan bahwa:

“Menurut saya sudah cukup membantu memenuhi kebutuhan gizi balita. Makanan yang diberikan tidak hanya sekadar makanan biasa, tetapi diusahakan mengandung unsur gizi yang dibutuhkan anak. Namun, tentunya makanan dari program ini bukan satu-satunya sumber makanan anak. Kebutuhan gizi tetap harus dipenuhi dari makanan yang diberikan oleh orang tua di rumah”.

Pengumpulan data wawancara juga dilakukan dengan pegawai kelurahan Margorejo. Beliau mengungkapkan bahwa:

“MBG merupakan salah satu upaya yang dapat mendukung penanganan masalah gizi. Namun, stunting merupakan masalah yang kompleks. Jadi penanganannya membutuhkan kerja sama antara pemerintah, posyandu, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat”.

Wawancara juga dilakukan dengan ibu balita. Hasil wawancara menunjukkan bahwa:

“MBG sangat membantu karena anak mendapatkan makanan tambahan. Jadi saya merasa kebutuhan makan anak lebih diperhatikan. Di rumah saya tetap memberikan makanan dan susu sesuai kebiasaan anak. Untuk anak saya porsinya cukup. Kadang habis, kadang tidak habis, tergantung anaknya mau makan atau tidak”.

Berdasarkan hasil penelitian di Posyandu Bunga Rose Kelurahan Margorejo, Program MBG diberikan kepada seluruh balita yang menjadi sasaran, yaitu sebanyak 49 balita, dan pemberian makanan dilakukan setiap hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan MBG telah sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kebutuhan balita terhadap makanan yang bergizi. Bagi masyarakat, keberadaan MBG memberikan manfaat karena membantu memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi balita secara rutin. Program ini juga dapat mengurangi beban orang tua dalam menyediakan makanan bergizi bagi anak, terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Dari sisi kepuasan penerima manfaat, kecukupan program dapat dilihat dari bagaimana orang tua atau pengasuh balita menilai makanan yang diberikan, baik dari segi menu, rasa, jumlah makanan, variasi makanan, maupun kesesuaian dengan kebutuhan anak. Apabila penerima manfaat merasa bahwa makanan yang diberikan dapat diterima oleh anak dan membantu memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, maka hal tersebut menunjukkan bahwa program telah memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan

demikian, kepuasan masyarakat menjadi salah satu indikator penting untuk melihat apakah MBG tidak hanya tersedia, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh kelompok sasaran.

Selain kepuasan, kecukupan juga dilihat dari kesesuaian kebijakan MBG dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Permasalahan yang menjadi perhatian di Posyandu Bunga Rose adalah pemenuhan kebutuhan gizi balita dan pencegahan *stunting*. Pemberian makanan bergizi secara rutin merupakan bentuk intervensi yang relevan dengan permasalahan tersebut karena balita membutuhkan asupan zat gizi yang cukup dan seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan seluruh 49 balita memperoleh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 49 balita penerima MBG, terdapat 48 balita yang tidak mengalami *stunting*, sedangkan 1 balita masih mengalami *stunting*. Temuan ini menunjukkan bahwa program telah memberikan kontribusi dalam mendukung pemenuhan gizi balita, tetapi keberadaan satu balita yang masih mengalami *stunting* menunjukkan bahwa MBG belum dapat menyelesaikan permasalahan *stunting* secara keseluruhan. Oleh karena itu, kecukupan program tidak dapat hanya dilihat dari pemberian makanan, tetapi juga perlu mempertimbangkan intervensi pendukung seperti pemantauan pertumbuhan balita, edukasi kepada orang tua mengenai pola makan dan pola asuh, pemeriksaan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan gizi di lingkungan keluarga.

4. Pemerataan (Equity)

Indikator ini erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan atau usaha secara adil didistribusikan. (Apriyadi, 2021), (Gunadi et al., 2023).

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kader Posyandu, menjelaskan bahwa:

“Pembagian MBG sudah diberikan kepada balita yang terdata sebagai penerima manfaat. Selama kegiatan posyandu, kami membagikan makanan sesuai jumlah sasaran”

Wawancara juga dilakukan dengan Pegawai Kelurahan Margorejo. Beliau mengungkapkan:

“Program MBG diupayakan diberikan secara merata kepada balita yang menjadi sasaran. Data penerima menjadi dasar dalam menentukan jumlah makanan yang disediakan, sehingga pembagian dapat disesuaikan dengan jumlah balita yang terdata di wilayah kelurahan.”

Selanjutnya, Bidan Posyandu Bunga Rose mengungkapkan:

“Secara umum balita yang menjadi sasaran sudah mendapatkan MBG. Kami tetap melakukan pemantauan melalui kegiatan posyandu untuk memastikan tidak ada balita yang terlewat, terutama balita yang membutuhkan perhatian khusus dalam masalah gizi.”

Pegawai SPPG Margodadi 3 selaku penyedia makanan MBG memaparkan:

“Kami menyiapkan jumlah makanan berdasarkan data sasaran yang diberikan. Jadi setiap balita yang

masuk dalam data penerima mendapatkan porsi sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Jika ada perubahan data, kami melakukan koordinasi dengan pihak posyandu.”

Berdasarkan hasil penelitian di Posyandu Bunga Rose Kelurahan Margorejo menunjukkan bahwa dari aspek pemerataan, program telah memberikan manfaat secara menyeluruh kepada kelompok sasaran. Tidak terdapat perbedaan dalam kesempatan memperoleh MBG karena seluruh balita yang terdata sebagai sasaran memperoleh manfaat program.

Pemerataan juga terlihat dari cara program memberikan manfaat kepada seluruh balita tanpa membedakan kondisi sosial maupun ekonomi keluarga. Program MBG pada dasarnya memberikan kesempatan yang sama kepada balita untuk memperoleh asupan makanan bergizi. Hal ini penting karena kebutuhan gizi merupakan kebutuhan dasar setiap balita dan tidak seharusnya hanya dapat dipenuhi oleh keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Dengan adanya MBG, balita dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang berbeda tetap memperoleh kesempatan untuk mendapatkan makanan bergizi.

5. Responsivitas

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya yakni efektifitas, efisensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi

kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Apriyadi, 2021) (Janatun et al., 2023).

Hasil wawancara dengan kader menunjukkan bahwa:

"Ibu-ibu balita cukup senang dengan adanya MBG karena membantu memenuhi makanan anak. Kalau ada menu yang kurang disukai anak atau ada masukan dari orang tua, kami menyampaikannya kepada pihak yang terkait."

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ibu balita memberikan respons positif terhadap pelaksanaan MBG karena program dinilai membantu memenuhi kebutuhan makanan anak. Salah seorang ibu balita menyampaikan:

"Saya senang dengan adanya MBG karena sangat membantu. Anak mendapat makanan tambahan dan saya juga terbantu dalam memenuhi kebutuhan makanan anak. Kalau menunya cocok, anak biasanya mau makan dan dihabiskan."

Hasil wawancara dengan pegawai SPPG menunjukkan bahwa pihak penyedia berupaya merespons kebutuhan dan masukan penerima manfaat melalui pengelolaan menu dan koordinasi dengan pihak posyandu. Pegawai SPPG menyampaikan:

"Kami menerima masukan dari pihak posyandu terkait makanan yang disukai atau kurang disukai anak. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi agar menu yang diberikan tetap bergizi dan dapat diterima oleh balita."

Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Posyandu Bunga Rose Kelurahan Margorejo,

responsivitas dapat dilihat dari bagaimana program mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan balita terhadap makanan yang bergizi, aman, layak, dan sesuai dengan kondisi serta preferensi anak. Responsivitas juga dapat dilihat dari kepuasan orang tua terhadap pelaksanaan program, penerimaan balita terhadap menu makanan, kesesuaian menu dengan kebutuhan gizi anak, serta kemampuan pelaksana dalam menerima dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 49 balita yang menjadi sasaran dan seluruhnya mendapatkan MBG setiap hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program telah memberikan respons terhadap kebutuhan masyarakat dalam memperoleh makanan bergizi bagi balita. Kehadiran MBG memberikan kemudahan bagi orang tua dalam memenuhi kebutuhan makanan anak, terutama karena makanan diberikan secara rutin melalui kegiatan Posyandu.

Responsivitas program juga dapat dilihat dari tingkat penerimaan masyarakat terhadap makanan yang diberikan. Apabila orang tua merasa terbantu, balita dapat menerima dan mengonsumsi makanan yang diberikan, serta menu dianggap sesuai dengan kebutuhan anak, maka hal tersebut menunjukkan bahwa MBG telah merespons kebutuhan aktual masyarakat. Sebaliknya, apabila terdapat makanan yang tidak disukai balita, menu yang kurang bervariasi, jumlah yang tidak sesuai, atau makanan yang tidak sesuai dengan kondisi tertentu pada anak, maka hal tersebut

menjadi masukan bagi pelaksana untuk melakukan perbaikan.

6. Ketepatan (*Appropriateness*)

Adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut (Apriyadi, 2021) (Rahayu, 2023).

Hasil wawancara dengan kader menunjukkan bahwa:

“Menurut saya program MBG ini tepat untuk balita karena anak memang membutuhkan makanan yang bergizi untuk pertumbuhan. Program ini juga membantu orang tua dalam menyediakan makanan yang lebih baik untuk anak”

Selanjutnya, salah satu ibu balita yang menerima MBG menyampaikan:

“Menurut saya program ini tepat karena anak-anak membutuhkan makanan bergizi. Dengan adanya MBG, saya terbantu karena anak mendapatkan makanan tambahan dan saya jadi lebih memperhatikan makanan yang diberikan kepada anak.”

Pegawai SPPG menilai bahwa MBG telah sesuai dengan tujuan intervensi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi kelompok sasaran. Informan menyampaikan:

“Program ini memang tepat untuk membantu pemenuhan gizi anak, karena makanan yang diberikan disiapkan khusus

untuk sasaran dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kami berusaha memastikan makanan yang diberikan tidak hanya mengenyangkan tetapi juga memiliki nilai gizi”

Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Posyandu Bunga Rose Kelurahan Margorejo, ketepatan program dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan pemberian makanan bergizi dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat, yaitu pemenuhan kebutuhan gizi balita dan upaya mencegah terjadinya *stunting*. Balita merupakan kelompok yang membutuhkan asupan gizi yang cukup dan seimbang karena berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, pemberian makanan bergizi secara rutin merupakan bentuk intervensi yang relevan dengan kebutuhan kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian, balita yang menjadi sasaran dan seluruh balita memperoleh MBG setiap hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa sasaran program telah sesuai dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi. Ketepatan juga terlihat dari adanya hubungan antara pemberian makanan bergizi dengan tujuan program dalam mendukung pencegahan masalah gizi dan *stunting*.

Namun, ketepatan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir berupa jumlah balita yang mengalami atau tidak mengalami *stunting*. Ketepatan juga perlu mempertimbangkan apakah jenis intervensi yang diberikan benar-benar sesuai dengan akar permasalahan *stunting*. *Stunting* merupakan

permasalahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga pemberian makanan bergizi melalui MBG merupakan salah satu bentuk intervensi, tetapi bukan satu-satunya solusi. Oleh karena itu, ketepatan program akan semakin kuat apabila MBG dilaksanakan bersamaan dengan pemantauan pertumbuhan, edukasi kepada orang tua, pemeriksaan kesehatan, pemberian intervensi bagi balita berisiko, serta peningkatan pengetahuan mengenai pola makan dan pola asuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Posyandu Bunga Rose Kelurahan Margorejo cukup efektif sebagai salah satu strategi dalam mendukung penanggulangan *stunting* pada balita. Hal ini ditunjukkan oleh cakupan program yang telah menjangkau seluruh 49 balita sasaran atau sebesar 100% dan pemberian makanan bergizi yang dilakukan setiap hari. Dari 49 balita penerima MBG, sebanyak 48 balita (97,96%) tidak mengalami *stunting*, sedangkan 1 balita (2,04%) masih mengalami *stunting*. Berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, pelaksanaan MBG menunjukkan capaian yang positif, terutama dalam pemenuhan asupan makanan bergizi, efisiensi penyaluran, pemerataan akses, serta kesesuaian program dengan kebutuhan sasaran. Meskipun demikian, keberadaan balita yang masih mengalami *stunting* menunjukkan bahwa MBG belum dapat

menjadi solusi tunggal karena *stunting* merupakan permasalahan yang memerlukan penanganan secara komprehensif. Oleh karena itu, pelaksanaan MBG perlu diintegrasikan dengan pemantauan pertumbuhan balita secara berkala, edukasi gizi dan pola asuh kepada orang tua, pemeriksaan kesehatan, serta intervensi khusus bagi balita yang berisiko mengalami *stunting*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, U., & Mulyani, S. (2025). *EFEKTIVITAS DAN TANTANGAN KEBIJAKAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS SEBAGAI INTERVENSI PENDIDIKAN DI INDONESIA EFFECTIVENESS AND CHALLENGES OF FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAM POLICY AS AN EDUCATIONAL*. 4, 362–368.
- Apriani, F. R., & Enos., P. (2020). *EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LINGGANG BIGUNG KABUPATEN KUTAI BARAT*. 8(1), 9005–9017.
- Apriyadi, Y. (2021). *EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SANGA-SANGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA*. 9(2), 125–136.
- Azizah, L. L. (2022). *EVALUASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) MELALUI TEORI WILLIAM DUNN (STUDI KASUS PADA SDN LIDAH KULON I / 464 SURABAYA)*. 48–57.
- Azizah, N. A. (2022). *Analisis Indeks*

- Pembangunan Manusia (IPM) di Negara ASEAN*. 3(1).
- Chasanah, A. N. (2024). *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Kenanga Kota Tangerang Anggun Nurul Chasanah*. 2(2).
- Dian, S. ; (2023). *POSYANDU, PERANAN KADER POSYANDU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN Timur*), (Studi Kasus Posyandu Melati 2 Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Selen. 3(06), 49–57.
- Fatoni, I., Ningrum, N. M., & Kebidanan, S. T. (2020). *Hubungan Inisiasi Menyusu Dini Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 12-24 Bulan*. 10(2), 66–79.
- Gunadi, B., Kostini, N., & Alexandri, M. B. (2023). *EVALUASI KEBIJAKAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA CIMAHI TAHUN 2020*. 5, 321–341.
- Hakam, Irhash Abdul ; Krisna Fatahillah, Rini Nur Faniati, Nihayah Nurul Izzah, R. S. P. (2023). *A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW : STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MANUSIA*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Sustainable Development Goals : Tinjauan Percepatan*. 6(1), 77–87. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(1\).4995](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(1).4995)
- Hidayani, W. R., Sulistyoningih, H., Tinggi, S., Kesehatan, I., Ibu, T. B., Ibu, P., & Keluarga, P. (2022). *Literature Review : Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Balita*. 01(01), 32–40. <https://doi.org/10.56741/bikk.v1i01.39>
- Hizriyani, R. T. S. A. (2021). *PEMBERIAN ASI EKSLUSIF SEBAGAI PENCEGAHAN STUNTING*. 8(2).
- Janatun, M., Rosiana, I., Reza, R. K., & Darmawan, I. (2023). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung*. 2(3), 159–166.
- Kusuma, C., Fatmasari, E., Wulandari, J., Dewi, P., Pahlevi, R., Djiara, S., & Katmawati, S. (2021). *Literature Review : Peran Kader Posyandu Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Prosiding Seminar Kesehatan Nasional Sexophone, Juni*, 107–116.
- Lasmadasari, Novi; Nengke Puspitasari, Iin Nilawati, H. (2023). *Monitoring Program Percepatan Penurunan Stunting : Intervensi Gizi Spesifik terhadap Pengetahuan dan Perilaku Ibu dalam Pemenuhan Gizi Bayi dan Balita Stunting Monitoring Program To Accelerate Determination : Specific Nutrition Intervention On Mother ' s*. 6(1), 61–68.
- Lendra, I. W. D. Y. F. (2025). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Kebijakan Makan Bergizi Gratis dan Relevansinya terhadap Nilai-nilai. Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5(1).
- Lestari, D., Akbar, F., Nurfadilah, L., Vacsal, M. R., & Meha, R. I. (2023). *Peran Posyandu Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa*. 3(2), 185–191.

- Lutfia Gunawan, Aisyah; Hasna Asyila Syifa, Lina Agustina, Puji Rahayu, E. H. (2025). *DEFINISI, FUNGSI DAN TUJUAN, PRINSIP, TAHAPAN PELAKSANAAN POS PAUD TERPADU (PPT)*. 6(1), 387–395.
- Maghfiroh, I. A. warul ulum. (2025). *ANALISIS PENGELOLAAN BUM DESA MAKMUR LECARI DALAM PERSPEKTIF GEORGE R. TERRY (STUDI DI DESA LECARI KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN)* *Inayatul Maghfiroh* ., 11(4).
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77–92. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>
- Nadila, D. D. N. (2023). *EVALUASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL WILLIAM DUNN*. 9, 107–113.
- Noor, F., Adi, I., Ariany, R., & Ekha, R. (2023). *PENANGANAN STUNTING DI PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PERSPEKTIF SOUND GOVERNANCE*. 5.
- Nugroho, B. I., Murtopo, A. A., Surejo, S., & Adhi, N. (2023). *Sosialisasi Dan Pelatihan Penerapan Aplikasi E-Posyandu Bagi Kader Posyandu Desa Bendasari Di Kabupaten Tegal*. 2(4), 462–469.
- Nukhbatillah, I. A., Setiawati, S., Hasanah, U., & Nurmalsari, N. (2024). *Evaluasi Mutu Pendidikan Menggunakan Pendekatan Teori Stufflebeam*. 2(1), 34–43. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v2i1.352>
- Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Qomarrullah, R. S. L. W. M. S. (2025). *DAMPAK JANGKA PANJANG PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS TERHADAP KESEHATAN DAN KEBERLANJUTAN PENDIDIKAN*. 5(2), 130–137.
- Rahayu, D. puspita; S. M. I. P. T. (2023). *EVALUASI PROGRAM KELAS IBU HAMIL SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PUSKESMAS BESUKI , KABUPATEN SITUBONDO PADA TAHUN 2023* *Dinda Puspita Suci Megawati Indah Prabawati Tjitjik Rahaju Abstrak*. 107–114.
- Rahmadhita, K. (2020). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada Permasalahan Stunting dan Pencegahannya Pendahuluan*. 11(1), 225–229. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.253>
- Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., & Putri, E. (2025). *ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI SEKOLAH DASAR INDONESIA TAHUN 2025*. 2(2), 2855–2866.
- Rantung, M. I. R. (2024). *Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). *Penelitian Kualitatif. Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Siringoringo, G. L. R. (2022). *PROGRAM DALAM*

PELAKSANAAN TUJUAN
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN (SDGs)
DALAM HAL MASALAH
PERUBAHAN IKLIM DI
INDONESIA. 05(01), 43–52.

Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*.

Weyana, A., Khatimah, N., Kamaruddin,
S. A., & Awaru, A. O. T. (2025).
*Rasionalisme Dalam Kebijakan
Publik : Analisis Dampak Program
Makan Bergizi Gratis Terhadap
Kesejahteraan Pelajar*. 3(4), 1969–
1976.

Zakirin, M., & Arifin, J. (2022).

EVALUASI KEBIJAKAN DILIHAT
DARI ASPEK DAMPAK PROGRAM
AWANG KABUPATEN BARITO
TIMUR (*Studi Kasus Pada
Komponen Pendidikan*). 5, 256–
271.